

**MERAJUT PERDAMAIAN MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BERWAWASAN MODERASI BERAGAMA**

Ahmad Asroni

Universitas Islam Indonesia

E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id

Abstrak:

Artikel ini mengkaji urgensi mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan moderasi beragama di Indonesia. PAI berwawasan moderasi beragama memiliki peran penting dan strategis dalam melahirkan generasi toleran dan multikultural. Melalui PAI berwawasan moderasi beragama, peserta didik diharapkan *committed* terhadap Islam sekaligus toleran terhadap pemeluk agama lain. Kehadiran PAI berwawasan moderasi beragama di Indonesia kian terasa urgen dilakukan di setiap institusi pendidikan (tak terkecuali institusi pendidikan Islam) karena menguatnya radikalisme di kalangan siswa/pelajar. PAI berwawasan moderasi beragama hanya akan berhasil bilamana diajarkan oleh pendidik PAI yang memiliki kesadaran moderasi beragama. Selain itu, kurikulum dan materi yang diajarkan tentunya juga harus memuat nilai-nilai moderasi beragama. Karena itu, diperlukan kemauan politik (*political will*) setiap *stakeholders*, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain untuk merumuskan kebijakan PAI beperspektif/berwawasan moderasi beragama, sehingga dapat menjadi alat (instrumen) yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi kepada setiap peserta didik. Dengan demikian, terajut harmoni dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, moderasi beragama, radikalisme, institusi pendidikan

Pendahuluan

Indonesia yang dikenal masyarakat dunia sebagai negara yang ramah, toleran, dan menjadi model bagi bangsa-bangsa lain, kini seakan telah kehilangan keramahannya. Kekerasan dan anarkisme berjubah agama kini seolah menjadi pemandangan yang biasa di negeri multireligi ini. Ironisnya, para pelaku kekerasan acap melakukan kekerasan seraya mengumandangkan nama Tuhan. Prilaku ini tentu tak beradab dan tidak pantas dilakukan oleh manusia yang beragama. Apapun dalihnya, kekerasan apalagi pembunuhan dengan semena-mena tidak dibenarkan. Kalaupun ada perbedaan teologis, tidak semestinya disikapi dengan kekerasan dan main hakim sendiri.

Merebaknya berbagai kekerasan berbasis SARA di Indonesia belakangan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai kebhinekaan di Indonesia mulai memudar. Padahal, perbedaan dan keragaman adalah *sunnatullāh*. Kehadirannya akan senantiasa ada dalam derap langkah kehidupan manusia. Ia akan senantiasa hadir pada kehidupan umat manusia. Meski

begitu, nilai-nilai pluralitas dan multikultural ternyata tidak selalu dipahami dan disadari oleh manusia, termasuk warga negara Indonesia. Menurut Zakiyuddin Baidhawiy (2007: 28), ada 3 indikator rendahnya pemahaman dan kesadaran multikultural warga negara Indonesia. *Pertama*, rendahnya pemahaman terhadap agama dan etnis lain. *Kedua*, rendahnya keinginan memahami budaya lain. *Ketiga*, rendahnya apresiasi dan toleransi terhadap budaya dan keyakinan/agama lain.

Maraknya kekerasan dan konflik bernuansa SARA di nusantara sejatinya berasal dari *social prejudice* (prasangka sosial). *Social prejudice* muncul lantaran tidak ada atau rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerima kelompok lain yang berbeda. Secara umum, rendahnya kesadaran multikultural masyarakat menyebabkan munculnya primordialisme dan klaim kebenaran (*truth claim*) sepihak yang mengklaim kelompoknya yang paling benar dan menganggap kelompok lain (*the others*) salah. Bahkan menganggapnya sebagai ancaman. Maraknya *social prejudice* dapat berujung konflik SARA yang tentunya akan mengancam integrasi bangsa Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Maraknya kekerasan dan konflik bernuansa SARA di Indonesia bisa jadi salah satunya disebabkan oleh ketidakberdayaan atau kegagalan pendidikan agama (Islam) dalam melahirkan peserta didik yang toleran dan berperspektif multikultural. Banyak kritik ditujukan terhadap praktik pendidikan agama. Praktik pendidikan agama, termasuk Pendidikan Islam, selama ini—terutama pada masa rezim Orde Baru— tidak lebih sekedar alat indoktrinasi untuk melanggengkan *status quo* penguasa (Baidhawiy, 2005: 18-19). Selama ini pula, praktik pendidikan agama (Islam) di lembaga-lembaga pendidikan lebih berwatak eksklusivistik dengan mengajarkan keselamatan dan klaim kebenaran (*salvation and truth claim*) di satu sisi, namun merendahkan agama lain yang berbeda di sisi lain (Baidhawiy, 2005: 31).

Di samping itu, praktik pendidikan agama dewasa ini lebih banyak berorientasi pada ritual *an sich*, tidak atau kurang berorientasi pada pendalaman nilai-nilai keagamaan (religiusitas) peserta didik (Susetyo, 2005: 74). Pendidikan agama sekedar pada pengajaran tentang persoalan hukum-hukum, aturan-aturan, dan larangan-larangan dan belum menyentuh hal-hal yang fundamental terkait permasalahan iman, harapan, dan kasih sayang. Pendidikan agama lebih menonjolkan *to have religion*, bukan *to be religious*. Model pembelajaran seperti ini hanya akan menghasilkan kesalehan pribadi daripada kesalehan sosial. Pembelajaran agama terkesan sekedar menjadikan orang taat pada aturan agama, tetapi kurang menaruh perhatian pada persoalan-persoalan sosial. Orientasi dasar pembelajaran agama

seharusnya dapat mengantarkan anak didik semakin religius dan bukan hanya sekedar beragama (Susetyo, 2005: 87-90). Romo Magnis-Suseno (2004: 81-82) menyebutkan bahwa praktik pendidikan agama di negeri ini tidak cukup memberi dampak positif bagi pembangunan etika/moral. Dalam perspektifnya, pendidikan agama acapkali diajarkan secara formal-ritualistik *an sich*, tanpa dibarengi upaya membangun sikap inklusif dan tanggung jawab etik.

Setali tiga uang dengan Romo Magnis-Suseno, Paul Suparno (2003: 32-33) melontarkan kritiknya terhadap praktik pendidikan agama. *Pertama*, pembelajaran agama lebih berorientasi dan menekankan pada hafalan. Akibatnya, meskipun peserta didik mengerti pelajaran agama dan karenanya dalam ujian mendapatkan nilai baik, akan tetapi pengetahuan tersebut tidak mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan selanjutnya. Pembelajaran agama kurang berorientasi pada pembentukan nilai moral, sikap hidup, dan penghayatan hidup yang mampu membantu peserta didik mengembangkan kehidupannya lebih baik. *Kedua*, pembelajaran agama lebih menekankan indoktrinasi. Model pendidikan agama semacam ini, pendidik (guru atau dosen) sangat aktif menjejali pengetahuan, sementara peserta didik lebih banyak hanya menjadi pendengar yang baik. Meminjam terminologi Paulo Freire, pendidikan semacam ini disebutnya dengan *banking system*. Peserta didik tidak diaktifkan untuk mencari nilai hidup. Akibatnya, nilai-nilai agama tidak dapat diinternalisasikan dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang baik. *Ketiga*, banyak pembelajaran agama yang terlalu menitik-beratkan pada ibadah, namun kurang menekankan pada penghayatan agama. *Keempat*, dalam evaluasi, pendidikan agama tampak menekankan pengetahuan hafalan. Nilai agama ditentukan oleh ujian akhir yang berisi pilihan ganda. Padahal yang lebih baik adalah nilai pendidikan agama diambilkan dari keseluruhan proses, apakah peserta didik berperilaku religius selama berada di lembaga pendidikan (sekolah/kampus). *Kelima*, pembelajaran agama kurang dihubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai sosial, emosional, spiritual, nilai hidup bersama, dan sebagainya. *Keenam*, kurang kuatnya dukungan dari kondisi lingkungan dan sistem. Internalisasi nilai-nilai agama acapkali kandas di tengah jalan lantaran tidak didukung oleh kondisi atau lingkungan yang sesuai, baik di lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat.

Pembelajaran agama mestinya tidak sekedar memberikan informasi atau memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga semestinya menyentuh kalbu, sehingga memotivasi peserta didik untuk terdorong melakukan perubahan. Tujuan pendidikan (agama) akan berhasil manakala menyasar pada ranah intelektual (kognitif), perilaku (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik) Anehnya, parameter keberhasilan peserta didik dalam pendidikan agama di Indonesia hanya semata-mata berdasarkan pada kemampuan kognitif dan psikomotorik saja. Karenanya, tidak

heran jika kerap muncul masalah-masalah moral, sosial, dan spiritual di antara anak didik. Sebab, pendidikan agama tidak mampu memberikan tuntutan moral dan memberi pegangan dalam memilih nilai dan norma untuk hidupnya. Pendidikan agama semacam ini hanya mampu melahirkan manusia cerdas, tetapi culas akan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Peserta didik hanya mementingkan pencapaian nilai kelulusan saja. Alhasil, kehadiran pendidikan agama malah mengabaikan makna beragama dan makna iman sejati (Santoso, 2005: 280-281). Akibat penekanan pendidikan agama pada aspek kognitif dan cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan sosial, maka mengakibatkan peserta didik kurang memiliki kepekaan terhadap problem-problem sosial-kemanusiaan (Rembangy, 2008: 208).

Oleh karena itu, urgen menghadirkan dan mengimplementasikan pendidikan agama (Islam) berwawasan moderasi beragama. Terlebih dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, menurut Azyumardi Azra (2020: ix-xi), masa depan Islam di Indonesia adalah Islam moderat (*wasathiyyah*). Dalam pandangannya, Islam moderat (Islam *wasathiyyah*) merupakan corak Islam yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), tidak saja untuk umat Islam, namun pula untuk kelompok agama lain. Bahkan, seluruh makhluk yang mendiami bumi. Lebih lanjut menurutnya, prospek Islam dan umat Muslim tidak pada model Islam yang galak, radikal, atau garis keras. Islam garis keras tidak akan mampu mengantarkan umat Islam kemajuan peradaban. Indonesia sungguh beruntung bahwa Islam yang berkembang sejak awal di Indonesia adalah Islam moderat (*wasathiyyah*). Dalam konteks kekinian, Islam moderat (*wasathiyyah*) mendapatkan tantangan dan ancaman dari kelompok Islam transnasional yang mengusung praktik dan model keagamaan yang radikal, kaku, dan literal. Kelompok Islam transnasional ini belakangan ini massif disebarkan melalui berbagai lini kehidupan umat Muslim Indonesia, termasuk ke kelompok-kelompok Islam moderat (*wasathiyyah*). Karena itu, moderasi Islam (Islam *wasathiyyah*) Indonesia perlu mendapatkan penguatan-penguatan dengan cara melakukan revitalisasi dan reaktualisasi, sehingga menjadi arus utama (*mainstream*) di Indonesia.

Pendidikan Agama Islam Berwawasan Moderasi Beragama

Menyimak ketidakberdayaan/kegagalan pendidikan agama dalam melahirkan peserta didik yang toleran dan multikultural, maka urgen kiranya bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan pendidikan agama berwawasan moderasi beragama. Pendidikan agama berwawasan moderasi beragama ini penting diimplementasikan karena penduduk Indonesia menganut beragam agama. Keragaman agama di Indonesia tentu saja sangat berpotensi menimbulkan konflik bilamana para penganutnya tidak saling menghormati dan menghargai.

Tanpa mengabaikan peran pendidikan agama-agama lain, Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan moderasi beragama memiliki peran penting dan strategis dalam melahirkan generasi toleran dan multikultural. Harapan ini bukanlah hal yang berlebihan karena mayoritas warga negara Indonesia menganut agama Islam.

Ketidakterdayaan pendidikan agama (Islam) melahirkan peserta didik yang toleran dan berwawasan multikultural meniscayakan adanya rekonstruksi atau pembaharuan. Rekonstruksi/pembaharuan yang dimaksud adalah dengan memasukkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam PAI. Dengan kata lain, dibutuhkan PAI berwawasan moderasi beragama. Keberadaan PAI berwawasan moderasi beragama penting diimplementasikan lantaran ia menyediakan ruang yang sama bagi tumbuh dan berkembangnya perbedaan dan keragaman agama. PAI berwawasan moderasi beragama merupakan alternatif baru pendidikan agama yang menekankan pendekatan dialogis untuk menginternalisasikan kesadaran hidup bersama dalam keragaman agama. PAI berwawasan moderasi beragama dibangun di atas semangat hubungan ekualitas dan kesederajatan, saling memahami, saling percaya, interdependensi, serta menghormati perbedaan dan keunikan masing-masing agama (Baidhawiy, 2005: 74). Melalui PAI berwawasan moderasi beragama, peserta didik diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap agama Islam di satu sisi dan toleran terhadap pemeluk agama lain di sisi lain.

Kehadiran PAI berwawasan moderasi beragama di Indonesia kian terasa urgen dilakukan di setiap institusi pendidikan (tak terkecuali institusi pendidikan Islam) karena menguatnya radikalisme di kalangan siswa/pelajar. di kalangan pelajar, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA). Komaruddin Hidayat menyebutkan beberapa temuan riset yang menunjukkan bahwa paham radikalisme telah menginfiltrasi pelajar SMA. Pelajar menjadi salah satu bidikan utama kelompok radikal karena mereka kebanyakan memiliki pengetahuan keagamaan yang rendah dan secara psikologis masih labil. Kelompok radikal berupaya menguasai lembaga OSIS dan Rohis.

Lebih lanjut menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia ini, jejaring radikalisme telah menyebar ke sekolah-sekolah. Oleh karenanya, pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua perlu menyikapinya dengan serius. Ia menambahkan bahwa yang perlu diwaspadai adalah penyebaran radikalisme kepada pelajar dengan cara *brain wash* (cuci otak) (<http://www.uinjkt.ac.id>). Selain itu, temuan riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa sebagian besar guru PAI dan siswa Muslim di Pulau Jawa memiliki tingkat toleransi yang rendah dan menolak keragaman agama (<http://www.ppim.or.id>).

Manakala institusi pendidikan dan peserta didiknya telah terpapar radikalisme agama dan intoleransi, maka harapan untuk melahirkan generasi toleran dan berperspektif multikultural hanya menjadi mimpi di siang bolong. Sebaliknya, institusi pendidikan hanya akan melahirkan generasi radikal dan intoleransi yang akan merobek rajutan kebhinnekaan Indonesia. Jika hal itu yang terjadi, dapat dipastikan predikat Indonesia sebagai negara yang paling ramah dan toleran hanya akan tinggal kenangan. Oleh karena itu, kehadiran PAI berwawasan moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan. PAI berwawasan moderasi beragama hanya akan berhasil bilamana diajarkan oleh pendidik yang memiliki kesadaran moderasi beragama. Selain itu, kurikulum dan materi yang diajarkan tentunya juga harus memuat nilai-nilai moderasi beragama. Karena itu, diperlukan kemauan politik (*political will*) setiap *stakeholders*, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain untuk merumuskan kebijakan PAI beperspektif/berwawasan moderasi beragama.

Kesimpulan

Berangkat dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PAI berwawasan moderasi beragama sangat urgen dan signifikan di Indonesia. Hal ini lantaran PAI berwawasan moderasi beragama dapat menjadi instrumen yang efektif dan strategis dalam menanamkan dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai toleransi beragama di kalangan peserta didik. Terlebih dewasa ini kelompok-kelompok keagamaan radikal gencar mendiseminasikan paham keagamaan radikal di kalangan siswa/pelajar.

PAI berwawasan moderasi beragama hanya akan berhasil bilamana diajarkan oleh pendidik yang memiliki kesadaran moderasi beragama. Selain itu, kurikulum dan materi yang diajarkan tentunya juga harus memuat nilai-nilai moderasi beragama. Karena itu, diperlukan kemauan politik (*political will*) setiap *stakeholders*, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain untuk merumuskan kebijakan PAI berwawasan moderasi beragama. Bilamana PAI berwawasan moderasi beragama dapat diimplementasikan di setiap lembaga dan level pendidikan, maka kerukunan dan perdamaian antarumat beragama di Indonesia dapat terajut dengan baik.

Daftar Pustaka

- Azra, A. 2020. *Relevansi Islam Wasathiyyah: Dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*. Jakarta: Kompas.
- Baidhawiy, Z. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga.
- , 2007. "Building Harmony and Peace through Multiculturalist Theology-Based Religious Education: An Alternative for Contemporary Indonesia", *British Journal of Religious Education*, Vol. 29, No. 1.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, "Sikap dan Perilaku Sosial-Keagamaan Guru-Guru Agama di Jawa", [http:// www.ppim.or.id/riset/](http://www.ppim.or.id/riset/). Diakses pada 28 Maret 2022.
- <http://www.uinjkt.ac.id>. Diakses pada 28 Maret 2022.
- Rembangy, M. 2008. *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: TERAS.
- Santoso, JTP. "Pluralisme dan Pendidikan Agama", dalam Th. Sumartana, et.al. 2005. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia* Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Suparno, P. 2003. "Pendidikan Agama di Sekolah Model KBK", *Basis*, No. 07-08, Tahun Ke-52.
- Suseno, FM, "Pendidikan, Pluralisme, dan Kebebasan Beragama", dalam Darmaningtyas, et.al., 2004. *Membongkar Ideologi Pendidikan: Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Resolusi Press.
- Susetyo, B. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS.